

**IMPLEMENTASI DISIPLIN KERJA PEGAWAI
DI KANTOR DESA LANDUNGSARI MALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:
PAULUS SOLO SEKE
2014210112

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

Etos kerja karyawan adalah aset terpenting dalam memenuhi tanggung jawab pengabdian masyarakat, kebangsaan, dan negara. Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana Kantor Desa Landungsari Malang menegakkan disiplin kerja pegawai. Untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan disiplin kerja bagi pegawai di Kantor Kelurahan Landungsari Malang. Seluruh data baik primer maupun sekunder yang terkumpul diolah, dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan disiplin kerja pegawai Kantor Desa Landungsari sangat berhasil. Pemimpin jelas memimpin dengan contoh untuk bawahannya. Karyawan akan mengikuti petunjuk pemimpin jika dia memimpin dengan memberi contoh.

Kata Kunci : Implementasi, Disiplin Kerja, Kantor Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, tujuan reformasi birokrasi adalah mengubah sistem pemerintahan secara mendasar dari segi manajemen, sumber daya manusia, dan aspek kelembagaan (organisasi) sebagai aparatur negara. Ketika faktor-faktor ini dipertimbangkan, seringkali dikatakan bahwa suatu organisasi atau lembaga masih kurang disiplin.

Untuk mencapai reformasi birokrasi tata pemerintahan yang baik dilaksanakan. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam membangun aparatur negara agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan umum secara lebih efektif dan efisien serta memajukan bangsa. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mencapai hal ini adalah meningkatkan disiplin karyawan. Istilah “taat dan mentaati peraturan yang berlaku”, “memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan”, “mampu melaksanakan dan tidak menolak apabila diberikan sanksi”, dan “melaksanakan dengan sungguh-sungguh apabila melanggar peraturan dan kewajiban yang diberlakukan. ” adalah semua contoh disiplin karyawan.

Mengingat eratnya hubungan antara motivasi kerja dan disiplin yang mempengaruhi produktivitas dan pelayanan masyarakat yang prima, yang juga

merupakan tujuan dari reformasi birokrasi, maka pada hakekatnya setiap pegawai harus memupuk dan menanamkan semangat disiplin dalam rangka melaksanakan tugas. berbagai aktivitas sehari-hari.

Etos kerja karyawan adalah aset terpenting dalam memenuhi tanggung jawab pengabdian masyarakat, kebangsaan, dan negara. Suatu standart kedisiplinan pegawai, menurut I.S. Levine dalam Sudaryanto (2012), adalah ketika karyawan datang secara berpakaian sesuai dengan pekerjaannya, teratur dan tepat waktu, menggunakan bahan dan peralatan dengan hati-hati, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan instruksi kantor atau perusahaan dan tepat waktu.

Diharapkan kepada pegawai negeri dan aparatur pemerintah untuk selalu siap dalam menunaikan tugasnya, namun sebaliknya dalam suatu instansi, dimana pegawai sering melanggar kebijakan disiplin, yang berdampak pada kinerja.

Tujuan pemilihan Kantor Desa Landungsari sebagai tempat penelitian adalah untuk mengetahui disiplin kerja pegawai dan penerapannya di tempat kerja. karena kinerja organisasi akan dipengaruhi oleh segala hal. Dimana di era globalisasi dan reformasi saat ini mensyaratkan kinerja organisasi yang unggul? Hasil observasi dan pengamatan langsung di lapangan menjadi dasar untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut di atas.

Berdasarkan Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul berikut berdasarkan hal tersebut diatas di Kantor Desa Landungsari : Disiplin kerja bagi pegawai di Kantor Desa Landungsari Malang.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah masalah utama berdasarkan deskripsi latar belakang sebelumnya:

1. Bagaimana Implementasi disiplin kerja pegawai Di Kantor Desa Landungsari Malang?
2. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam Implementasi disiplin kerja pegawai di Kantor Desa Landungsari Malang?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi disiplin kerja pegawai Di Kantor Desa Landungsari Malang.
2. Untuk mengetahui Aspek yang perlu diperhatikan dalam Implementasi disiplin kerja pegawai di Kantor Desa Landungsari Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya ilmu pemerintahan tentang disiplin kerja pegawai
2. sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Esterberg, Kristin G. 2009. *Qualitative Methods in Social Research*, New York: Mc Graw
- Indrajit, Wisnu & Soimin, 2014 *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan*. Malang: Intrans Publishing.
- Mardikanto, dan Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Jurnal:

- Anggraeni, Maria Sri. 2016. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta*. Volume 28, No. 2, 2016.
- Azis, Ratna Prasetyo. 2016. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika. Volume XI. Nomor 1.
- Ferdi, Ubi, Suprojo. 2019. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 8. Nomor. 4
- Fitriah. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Volume 1. Nomor 1. gunanto Agung, Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono ,Darwanto. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Volume 13. Nomor 1.
- Sri Kusuma. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development.
- Queen, Widi. 2016. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 5. Nomor 2.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *tentang Badan usaha Milik Desa.*

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 *tentang Badan Usaha Mlik Desa*

PP No. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa.*

Undang-undang No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*